



Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Sopyan Sauri^{1*}, Amud Jamaludin², Dina Rosita³, Hilma Mega Farha⁴, Jejen Jaelani⁵

STAI Riyadhul Jannah, Indonesia | sawsopyan@gmail.com¹

STAI Riyadhul Jannah, Indonesia | maungsubang@gmail.com²

STAI Riyadhul Jannah, Indonesia | dinarosita858@gmail.com³

STAI Riyadhul Jannah, Indonesia | kimhilmajk@gmail.com⁴

STAI Riyadhul Jannah, Indonesia | jaelanijejen870@gmail.com⁵

Correspondence Author*

Abstract

The implementation of BUMDes has not been fully implemented by all villages in Indonesia until the issuance of Law No. 6/2014. Even in some areas, the existence of BUMDes still cannot run effectively and be able to contribute to the development and empowerment of the community in the village. This research intends to determine the utilization of BUMDes funds by taking a case study in Taringgul Landeuh Village, Kiarapedes Sub-district, Purwakarta Regency, which is one of the villages that implements BUMDes: First, to determine the involvement of the Taringgul Landeuh Village community in the utilization of BUMDes funds. Second, to determine the utilization of BUMDes funds in Taringgul Landeuh Village. Third, to determine the contribution of BUMDes in Taringgul Landeuh Village in community development and empowerment. The method in this study is quantitative descriptive research. Data collection in this study was conducted by structured interviews with questionnaires to 50 respondents for primary data collection and secondary data collection from Taringgul Landeuh Village. The results of the study show that community participation in BUMDes activities is still lacking because the community's knowledge of the BUMDes program is still small. Regarding utilization for community empowerment, it is still not optimal due to a number of obstacles, especially the BUMDes budget.

Keywords: Real Work Lecture, Village Government, BUMDes

Abstrak

Implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia hingga dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes yang secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui keterlibatan masyarakat Desa Taringgul Landeuh dalam pemanfaatan dana BUMDes. Kedua, untuk mengetahui pemanfaatan dana BUMDes di Desa Taringgul Landeuh. Ketiga, untuk mengetahui kontribusi BUMDes di Desa Taringgul Landeuh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Metode dalam Studi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan kuesioner kepada 50 responden untuk pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder dari Desa Taringgul Landeuh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pemanfaatan bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama anggaran BUMDes.

Kata kunci: Kuliah Kerja Nyata, Pemerintahan Desa, BUMDes

Pendahuluan

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012).

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hingga dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Studi yang pernah dilakukan oleh (Ramadana, dkk), di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang menyimpulkan bahwa hanya sebagian masyarakat di Desa Landungsari yang merasa terbantu dengan adanya BUMDes yaitu melalui penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Tetapi, secara keseluruhan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa. Sehingga BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi dinilai belum berhasil.

Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan dana BUMDes masih belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari usaha BUMDes yang dijalankan di desa tersebut yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di desa kita kuliah kerja nyata yaitu Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes.

Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam kegiatan ini meliputi partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes, pemanfaatan dana BUMDes dan kontribusi BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kuesioner untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sebanyak 50 orang untuk mengetahui secara langsung partisipasi masyarakat serta kontribusi BUMDes bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain wawancara, dilakukan juga *indepth interview* kepada beberapa perangkat desa untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan BUMDes serta kontribusinya terhadap pembangunan desa. Wawancara akan menggunakan panduan instrumen yang telah disusun sebelumnya.

Selain menggali data primer, dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder tentang BUMDes dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lokasi studi yang bisa

didapat dari BPS, kajian-kajian sebelumnya dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih. Di akhir laporan, selain akan dipetakan temuan-temuan studi juga diusulkan strategi dan program yang dibutuhkan dalam implementasi BUMDes.

Hasil dan Pembahasan

Program BUMDes sesungguhnya mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat kerja sama program BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tapi juga keuntungan dalam aspek sosial.

Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan masyarakat atau sosial. Pembangunan desa dalam aspek fisik contohnya sarana, prasarana dan manusia misalnya pembangunan jalan desa, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah dan pendidikan (Muhi, 2011). Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terwujudnya kerangka pengetahuan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya demi terciptanya masyarakat adil makmur (Widjaja, 2005).

Di dalam pelaksanaan pengelolaan dana BUMDes di berbagai daerah dalam prakteknya masih seringkali ditemui belum mengusung semangat gotong royong yang terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat sehingga program yang dijalankan tidak berkesesuaian dengan akar kebutuhan masyarakat desa. Hasilnya banyak BUMDes yang kemudian mengalami *collaps*.

Di Desa Taringgul Landeuh, sebagai salah satu penyelenggara BUMDes terbaik kedua di Kabupaten Purwakarta, diakui telah menerapkan mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh aparat desa dengan masyarakat yang menjadikan BUMDes di Desa ini masih tetap survive hingga sekarang. Tetapi eksistensi BUMDes selama ini masih bersifat fluktuatif atau kondisinya tidak stabil dikarenakan berbagai macam kendala. Sementara itu ditinjau dari segi pemanfaatan dan kontribusi dalam pembangunan desa hal ini sudah nampak dari berbagai jenis program bantuan ke masyarakat serta hasil pembangunan secara fisik.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana BUMDes

Perkembangan BUMDes di Desa Taringgul Landeuh yang bisa bertahan hingga saat ini karena adanya partisipasi masyarakat. Ketua BUMDes di Desa Taringgul Landeuh saat ini menuturkan bahwa yang membedakan BUMDes di Desa Taringgul Landeuh dengan desa lainnya adalah adanya keterlibatan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sementara itu, dari hasil survey menunjukkan bahwa 82% responden mengetahui tentang adanya program BUMDes, namun hanya 28% saja yang menyatakan tahu dengan pasti sedangkan 54% menyatakan tahu tetapi hanya sedikit saja.

Di dalam penelitian ini juga menemukan bahwa 18% responden mengaku tidak tahu tentang adanya program BUMDes. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan program BUMDes belum sepenuhnya menyentuh atau mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1
Pengetahuan Program BUMDes

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu Pasti	14	28%
2.	Tahu Sedikit	27	54%
3.	Tidak Tahu	9	18%
	Jumlah	50	100%



Gambar 1
Wawancara dengan Ketua, bendahara bumdes dan masyarakat

Jika program yang ada tidak diketahui atau diketahui tetapi hanya sedikit maka untuk menjangking partisipasi masyarakat dalam skala menyeluruh sulit untuk diwujudkan.

Hal ini juga tercermin dari pengakuan 62% yang mengatakan tidak pernah memperoleh bantuan dari Program BUMDes dan hanya 38% saja yang mengaku pernah menerima. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pelaksanaan BUMDes, pihak pemerintah desa masih kesulitan dalam melakukan pengembangan. Menurut pengakuan ketua BUMDes memang ada beberapa kendala salah satunya terkait anggaran.

Tabel 2
Perolehan Bantuan dari Program BUMDes

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	19	38%
2.	Tidak Pernah	31	62%
	Jumlah	50	100%

Selain persoalan anggaran, masih sedikitnya masyarakat yang memperoleh bantuan dari BUMDes ini adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat terkait program BUMDes itu sendiri. Ini merupakan sinyal bagi pemerintah Desa Taringgul Landeuh bahwasannya keberadaan BUMDes di Desa Taringgul Landeuh masih harus terus disosialisasikan tidak hanya terkait tentang keberadaannya tetapi juga cara mengakses hingga pada transparansi penggunaan dana BUMDes. Hal ini tidak lain untuk menjangking lebih banyak aspirasi dan partisipasi masyarakat agar program BUMDes memiliki banyak dukungan dan semakin berkembang.

b. Pemanfaatan Dana BUMDes di Desa Taringgul Landeuh

Pemanfaatan dana BUMDes di Desa Taringgul Landeuh selama ini digerakkan untuk simpan pinjam & kredit barang. Dengan menggunakan dana BUMDes untuk kegiatan simpan pinjam dan kredit barang dinilai lebih produktif dalam mengakumulasi modal jika pihak BUMDes telah bersepakat dengan pihak masyarakat/peminjam. Hasil dari simpan pinjam dan kredit barang inilah yang kemudian oleh pemerintah Desa Taringgul Landeuh digunakan sebagai pembiayaan pembangunan dan memberikan beberapa program untuk masyarakat contohnya dari bidang pendidikan yaitu program insentif untuk guru-guru majelis atau madrasah.

Ke depan salah satu penggunaan dana BUMDes akan digunakan untuk mengembangkan pasar dan air PAM yang saat ini dikelola oleh karang taruna dan kelompok masyarakat. Selanjutnya penggunaan dana BUMDes juga akan digunakan untuk mengembangkan teknologi informasi desa melalui internet desa. Ketua BUMDes berpendapat bahwa selain berguna untuk pengembangan teknologi informasi desa, keberadaan internet juga memberikan prospek bisnis yang menjanjikan.

Adanya program BUMDes ini memang belum bisa menjangkau sebagian besar masyarakat, meskipun begitu keberadaan BUMDes untuk dapat membantu masyarakat masih sangat dibutuhkan. Sebagaimana pengakuan 54% responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan program BUMDes untuk mengembangkan usaha yang mereka tekuni.

Sebanyak 24% responden mengaku cukup membutuhkan bantuan BUMDes untuk pengembangan usaha, namun ada 12% responden yang mengaku tidak membutuhkan bantuan BUMDes untuk pengembangan usaha dengan alasan mereka memang tidak memiliki usaha dan tidak mengetahui jika memperoleh pinjaman usaha harus digunakan untuk mengembangkan usaha yang seperti apa.

Tabel 3
Kebutuhan akan Bantuan Program BUMDes untuk Pengembangan Usaha

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Membutuhkan	5	10%
2.	Membutuhkan	27	54%
3.	Cukup Membutuhkan	12	24%
4.	Tidak Membutuhkan	6	12%
	Jumlah	50	100%

Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa antusias masyarakat dalam adanya kegiatan BUMDes diharapkan bisa memberi bantuan yang sifatnya tidak hanya permodalan tetapi juga bantuan pengembangan usaha yang lain yang dapat membuat mereka berdaya dalam mengembangkan usaha dan menghadapi persaingan *market* yang semakin ketat. Tidak hanya usaha dalam bidang industri kecil tetapi juga dalam usaha pertanian yang harus bersaing dengan produk pangan import. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan BUMDes ini potensi dan kretivitas yang masyarakat ciptakan muncul ke permukaan bahkan internasional.

c. Kontribusi BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Di dalam pembangunan desa hal yang perlu diketahui adalah memahami dan memperhatikan berbagai kekhususan atau keunikan yang ada di dalam masyarakat desa tersebut. Tanpa mengetahui hal tersebut kemungkinan program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan (Nasrul, 2013).

Demikian juga dengan pembangunan desa yang dilakukan melalui program BUMDes hendaknya berkesesuaian dengan potensi lokal yang ada. Sebagaimana pemanfaatan dana BUMDes yang telah dilakukan oleh Desa Taringgul Landeuh dengan memperhatikan

kebutuhan masyarakat lokal yang mayoritas sebagian besar bekerja sebagai petani tentunya diharapkan usaha yang dikelola bisa memenuhi kebutuhan dalam sektor tersebut.

Dalam prakteknya, pengelolaan dana BUMDes di Desa Taringgul Landeuh sebagian besar digunakan untuk jasa simpan pinjam dan kredit barang. Dari berbagai usaha tersebut memang mampu memberikan pemasukan, akan tetapi apakah hal tersebut dapat memberikan kontribusi tidak hanya dari segi pembangunan fisik tetapi juga aspek pemberdayaan bagi masyarakat.

Selama ini, masyarakat di Desa Taringgul Landeuh telah memperoleh manfaat langsung dari adanya program BUMDes yaitu dari aspek pembangunan fisik yang berupa perbaikan sarana publik. Sebanyak 54% responden mengaku memperoleh manfaat bantuan fasilitas publik dari program BUMDes dan hanya 22% yang menyatakan cukup merasakan.

Tabel 4
Perolehan Manfaat Fasilitas Publik dari Program BUMDes

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Merasakan	27	54%
2.	Merasakan	12	36%
3.	Cukup Merasakan	11	22%
4.	Tidak Merasakan	0	0%
	Jumlah	50	100%

Adapun jenis bantuan yang diterima oleh desa dari hasil pengelolaan dana BUMDes secara fisik ada 18% responden yang mengatakan untuk perbaikan/pembangunan jalan. Sebanyak 24% responden mengaku dari program BUMDes ada bantuan perbaikan/pembangunan fasilitas publik bidang ekonomi dan 24% responden mengaku untuk perbaikan/pembangunan tempat ibadah.

Program BUMDes juga berkontribusi untuk perbaikan/pembangunan jembatan yang dinyatakan oleh 6% responden. Sebanyak 26% mengatakan bahwa program BUMDes membantu perbaikan/pembangunan sarana air bersih dan 2% untuk pembangunan fasilitas kesehatan.

Selain berbagai perbaikan/pembangunan fasilitas umum tersebut, kegiatan BUMDes di Desa Taringgul Landeuh juga mewadahi dan bekerja sama dengan berbagai kegiatan kelembagaan di masyarakat seperti kelompok warga, kelompok remaja, sebagaimana yang dituturkan oleh Ketua BUMDes Desa Taringgul Landeuh Bapak berikut ini.

“Sementara ini hanya itu saja. Paling hanya kegiatan rutin kelompok saja. Kita punya beberapa kelompok warga, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok pemuda, kelompok Air bersih. Semuanya ikut berkontribusi dalam kegiatan BUMDes. Memang itu bukan seluruhnya bagian BUMDes, hanya kegiatan rutin dari warga atau kelompok saja. Saya kira ini merupakan bentuk dukungan dari adanya BUMDes. Kita juga menjadi salah satu BUMDes terbaik kedua di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah desa kita aktif, segala hal kita ikuti. Kita baru bangun semua kebutuhan warga seperti, perbaikan jalan ke persawahan supaya alokasi waktu ketika petani panen tidak sulit membawa padi bisa pakai motor, sarana air, perpustakaan/teras baca, semuanya kerjasama dari kelompok-kelompok yang ada, kemudian kita sebagai BUMDes mewadahi itu semua”.

Tabel 5
Jenis Bantuan yang diterima Desa dari Program BUMDes

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1.	Perbaikan/Pembangunan Jalan	9	18%

2.	Perbaikan/Pembangunan Fasilitas Publik Bidang Ekonomi	12	24%
3.	Perbaikan/Pembangunan Tempat Ibadah	12	24%
4.	Perbaikan/Pembangunan Jembatan	3	6%
5.	Perbaikan/Pembangunan Sarana Air Bersih	13	26%
6.	Perbaikan/Pembangunan Fasilitas Kesehatan	1	2%
Jumlah		50	100%

Hasil dari berbagai usaha BUMDes di Desa Taringgul Landeuh terbukti telah mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan desa secara fisik, akan tetapi pembangunan desa dari aspek pemberdayaan masyarakat belum tersentuh. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan yang dimiliki terutama dari segi pembiayaan.

Dari analisa yang telah dilakukan, sebenarnya cukup banyak kontribusi BUMDes bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dalam pengelolaannya sekali lagi masih banyak kendala yang harus dihadapi terutama terkait persoalan anggaran maupun letak geografis wilayah tersebut. Belajar dari kesuksesan Desa Taringgul Landeuh dalam pemanfaatan dana BUMDes sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki karena adanya kendala tersebut menyebabkan BUMDes di Desa Taringgul Landeuh belum mampu melakukan pembangunan desa dari sisi pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Sebagai program yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, keberadaan BUMDes di beberapa daerah justru mengalami kondisi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya kurang atau tidak membuahkan hasil. Berbagai kendala telah diteliti dan menemukan banyak variabel penyebab yang membuat BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang didambakan. BUMDes Desa Taringgul Landeuh merupakan salah satu bukti BUMDes yang masih eksis ditengah-tengah pembangunan desa tersebut.

Studi yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat tentang partisipasi, pemanfaatan dan juga kontribusi BUMDes di Desa Taringgul Landeuh serta berbagai kendala pengembangan yang dihadapi. Tujuannya tidak lain adalah mengembangkan keberhasilan BUMDes yang sudah ada dan memberi masukan atau solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi.

Dari analisis data yang telah dilakukan, adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang, hal ini terlihat dari pengetahuan mereka tentang program BUMDes. Program kegiatan BUMDes di Desa Taringgul Landeuh belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di dalam penelitian ini 54% responden menyatakan tahu tetapi hanya sedikit saja. Hal ini juga tercermin dari pengakuan 62% yang mengatakan tidak pernah memperoleh bantuan dari Program BUMDes dan hanya 38% saja yang mengaku pernah menerima. Masih sedikitnya masyarakat yang memperoleh bantuan dari BUMDes ini adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat terkait cara mengakses bantuan dari BUMDes. Pemanfaatan dana BUMDes dipergunakan untuk usaha jasa simpan pinjam dan kredit barang, yang kemudian hasil usahanya untuk perbaikan atau pembangunan fisik di desa, sementara untuk kegiatan pemberdayaan masih sedikit karena terhambat beberapa persoalan salah satunya modal. Kebanyakan kontribusi adanya BUMDes dirasakan masyarakat dari aspek pembangunan fisik seperti perbaikan atau pembangunan fasilitas publik yaitu sebanyak 54% responden mengaku memperoleh manfaat bantuan fasilitas umum dari program BUMDes. Sedangkan kontribusi untuk kegiatan yang lain seperti pemberdayaan masyarakat masih belum banyak dirasakan manfaatnya.

Referensi

- Chamber, R. (1987). *PEMBANGUNAN DESA, MULAI DARI BELAKANG*. Jakarta: LP3ES.
- Kessa, W. (2015). *BUKU 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Laily, E. I. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF. *Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Lubis, T. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.3(3)*, 163-174.
- Masri & Sofian Effendi Singarimbun. (1995). *METODE PENELITIAN SURVAY*. Jakarta: LP3ES.
- Nasrul, W. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Adat Adat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 102-109.
- Putra, A. S. (2015). *BUKU 7 BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT KOLEKTIF DESA*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ramadana, dkk. (n.d.). *KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*.
- Scott, J. C. (1989). *MORAL EKONOMI PETANI*. Jakarta: LP3ES.
- Soehartono, I. (1995). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Sumadi, dkk. (n.d.). *PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*.
- Suyanto, Bagong & Karnaji. (2005). *KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tumbel, T. M. (2014). ANALISIS BANTUAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*.
- Wijanarko, A. S. (2012). *PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANDAN KRAJAN KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional.
- Zain, M. (1999). REFORMASI PENGENTASAN KEMISKINAN: DARI PENDEKATAN EKONOMI KE PENDEKATAN KESEJAHTERAAN. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 79-96.